

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP DAN DOKUMEN NEGARA

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 (Putaran 1)*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2004.

MPR RI. *Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Laporan PAH I BP MPR 2000, Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Laporan PAH I BP MPR 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

MPR RI. *Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun Sidang 1999–2000 dan Tahun Sidang 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun Sidang 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun Sidang 2000, Buku III*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

MPR RI. *Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun Sidang 2000, Buku IV*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

- MPR RI. *Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun Sidang 2000, Buku V*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945: Tahun Sidang 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rapat PAH I Badan Pekerja MPR Tahun Sidang 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rapat PAH III Badan Pekerja MPR*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2000, Buku Tiga*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2000, Buku Empat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2001, Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2001, Buku Dua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2001, Buku Tiga*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2001, Buku IV*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku Empat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku Lima*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

MPR RI. *Risalah Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR RI, 6 Oktober 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.

MPR RI. *Risalah Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Buku III*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

MPR RI. *Risalah Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli).

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli).

Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Penonaktifan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Surojo Bimantoro*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.

Sekretariat Jenderal MPR RI. "Pimpinan MPR Tegaskan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 Sudah Tidak Berlaku, Bamsuet Desak Segera Pulihkan Nama Baik Gus Dur." 25 September 2024. Diakses 3 Maret 2026. <https://www.mpr.go.id/berita/Silaturahmi-Kebangsaan-Pimpinan-MPR-bersama-Keluarga-Besar-Presiden-RI-ke-4-Abdurrahman-Wahid>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Perubahan).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Laporan Kasus: Cekal Sri Bintang Pamungkas*. Jakarta: Direktorat Operasional YLBHI, 1996.

SURAT KABAR

Amandemen dalam suasana kepentingan politik. (2000, 8 Agustus). *Kompas*.

Amandemen kedua UUD 1945: Sistem pemerintahan negara tak tergambar jelas. (2000, 9 Agustus). *Kompas*.

Amandemen konstitusi harus melibatkan pakar. (2000, 21 Agustus). *Kompas*.

Amandemen UUD 1945 sebagai keharusan. (2000, 6 Agustus). *Kompas*.

Amandemen UUD 45: Golkar usulkan presiden dan DPR sepenuhnya dipilih rakyat. (1999, 8 Oktober). *Kompas*.

Calo jual beli suara berkeliaran. (1999, 4 Oktober). *Kompas*.

Dalam lobi PDIP abaikan para senior partai. (1999, 5 Oktober). *Republika*.

Dilema pemilihan presiden. (1999, 18 Oktober). *Media Indonesia*.

Dimulai, 'gerilya politik' lemahkan calon presiden. (1999, 2 Oktober). *Kompas*.

Fraksi TNI jadi penentu pemilihan presiden. (1999, 8 Oktober). *Republika*.

Implikasi pemilihan presiden secara langsung. (2000, 10 Agustus). *Kompas*.

Istilah mandataris dihilangkan. (1999, 5 Oktober). *Media Indonesia*.

Ketua MPR: Pasal krusial jangan di-voting. (2001, 9 November). *Kompas*.

Ketua MPR: Perubahan UUD jamin Indonesia demokratis. (2002, 2 Agustus). *Kompas*.

KPU desak MPR selesaikan perubahan ketiga UUD 1945. (2001, 1 November). *Kompas*.

KPU mulai persiapan Pemilu 2004. (2001, 10 November). *Kompas*.

Latief, A. (1999, 9 Oktober). Presiden dipilih langsung oleh rakyat. *Republika*.

Lubis, M. (1999, 20 Oktober). Mengapa pemilihan presiden terbuka? *Kompas*.

Memalukan, kisruh di sidang tahunan MPR. (2001, 2 November). *Kompas*.

Money politics di SU MPR: Gerilya dilakukan sampai ke keluarga. (1999, 4 Oktober). *Kompas*.

MPR menyetujui amandemen UUD 1945. (1999, 19 Oktober). *Kompas*.

Muhajir, A. (2023, 19 Mei). Politik dagang sapi. *Kumparan*.
<https://kumparan.com/ahmad-muhajir-1685020387019315623/politik-dagang-sapi-21r9G7k8D8k/3>

Pandangan 3 guru besar hukum tata negara: Konstruksi perubahan kedua UUD 1945 kacau. (2000, 14 Agustus). *Kompas*.

Parawansa, K. I. (1999, 1 Oktober). Rakyat harus memilih wakilnya langsung. *Republika*.

PDI-P tidak goyah hadapi kekuatan poros tengah. (1999, 5 Oktober). *Media Indonesia*.

Pembahasan perubahan kedua UUD 1945: Pasal sensitif tak diprioritaskan. (2000, 12 Agustus). *Kompas*.

Pemilihan presiden dengan musyawarah manipulasi kedaulatan rakyat. (1999, 8 Oktober). *Republika*.

Pemilihan presiden langsung timbulkan komplikasi politik. (2002, 1 Agustus). *Kompas*.

Pendapat akhir fraksi MPR: Beda prinsip di putaran kedua pemilihan presiden. (2001, 10 November). *Kompas*.

Pertemuan informal lintas fraksi MPR: Disepakati, pemilihan presiden langsung. (2001, 1 November). *Kompas*.

Perubahan keempat UUD 1945 disahkan. (2002, 11 Agustus). *Kompas*.

Perubahan pertama UUD 1945: 9 pasal diamandemen. (1999, 20 Oktober). *Republika*.

Perubahan UUD 1945: Beberapa pasal terlalu reaktif. (2002, 6 Agustus). *Kompas*.

'Politik dagang sapi' sulit dihindarkan. (2000, Agustus). *Kompas*. [tanggal tidak tercantum]

Prof Dr William Liddle: Pemilihan presiden langsung membawa komplikasi. (2000, 15 Agustus). *Kompas*.

Semakin gencar, penolakan terhadap perubahan UUD. (2002, 1 Agustus). *Kompas*.

Seruan warga peduli: SU MPR harus tangkap aspirasi rakyat. (1999, 1 Oktober). *Kompas*.

Sihaloho, A. M. (1999, 6 Oktober). Pemilihan presiden nanti dipilih langsung oleh rakyat. *Republika*.

Soal pemilihan langsung: Fraksi MPR berbeda pendapat. (2000, 10 Agustus). *Kompas*.

Soal pemilihan presiden: Mayoritas fraksi sepakat langsung. (2001, 5 November). *Kompas*.

Soal pemilihan presiden langsung: Mayoritas fraksi sepakat. (2002, 5 Agustus). *Kompas*.

Soal perubahan kedua UUD 1945: Diwarnai kepentingan politik sesaat. (2000, 15 Agustus). *Kompas*.

ST MPR diharapkan terima seluruh permintaan KPU. (2001, 2 November). *Kompas*.

SU MPR 1999 lebih utamakan lobby di luar gedung. (1999, 3 Oktober). *Kompas*.

SU MPR masih diwarnai lobi-lobi luar gedung. (1999, 3 Oktober). *Kompas*.

Surbakti, R. (2000, 10 Agustus). Implikasi pemilihan presiden secara langsung. *Kompas*.

Tinggal sehari pembahasan amandemen UUD oleh Komisi A, baru dua pasal disetujui. (2000, 14 Agustus). *Kompas*.

Tuntutan soal perubahan UUD 1945: Ada tiga kelompok penanda tangan. (2002, 2 Agustus). *Kompas*.

Upaya mengakhiri ketidakpastian. (1999, 2 Oktober). *Kompas*.

Usulan konkret amandemen UUD 1945. (1999, 3 Oktober). *Kompas*.

Waspada politik uang dan 'dagang sapi'. (1999, 5 Oktober). *Kompas*.

Zoelva, H. (1999, 9 Oktober). Ada masalah jika rakyat langsung memilih presiden. *Republika*.

JA, D. (1999, 8 Oktober). Kedaulatan elit atau kedaulatan rakyat. *Kompas*.

JA, D. (2001, 10 November). Jalan buntu di MPR. *Kompas*.

BUKU

Anggraini, Titi. *Menuju Pemilu Langsung: Catatan Perjuangan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Perludem Press, 2011.

Aspinall, Edward. *Paradoks Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri, 2010.

Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Kata Pengantar." Dalam Ardiles R.M. Mewoh dkk. *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Cahyono, M. Faried dan Lambang Trijono (Ed.). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*. Yogyakarta: CSPS Books, 2004.

Davidson, Jamie S. *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*. Yogyakarta: INSISTPress, 2022.

Denny JA. *Demokrasi Indonesia: Visi & Praktek*. Diedit oleh F. Surdiasis. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Denny JA. *Jejak-Jejak Pemilu 2004: Talkshow dalam Dialog Aktual Radio Delta FM*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Denny JA. *Memperkuat Pilar Kelima: Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- DPP Partai Golkar. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: DPP Partai Golkar, t.t.
- Evans, Kevin Raymond. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 1999.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
- Hardiman, F.B. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Koirudin. *Menuju Partai Advokasi*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). *Laporan Evaluasi Pemilu Legislatif Pasca-Reformasi*. Jakarta: KIPP Indonesia, 2014.
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). *Laporan Evaluasi Pilkada Tingkat Provinsi*. Jakarta: KIPP Indonesia, 2014.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Liddle, R. William. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1996.

- Mewoh, Ardiles R.M. "Pemilihan Kepala Daerah di Perbatasan Indonesia-Filipina." Dalam Ardiles R.M. Mewoh dkk. *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem, 2015.
- Mewoh, Ardiles R.M. dkk. *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem, 2015.
- Perdana, Aditya dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2017.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Romli, Lili. *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Romli, Lili. *Sistem Pemilu dan Dinamika Partai Politik Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Dominasi Menuju Persaingan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tobing, Jakob. *Membentuk Negara Hukum: Suatu Catatan Perjalanan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Viryan. "Catatan Integritas Pemilu 2014." Dalam Ardiles R.M. Mewoh dkk. *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem, 2015.

ARTIKEL JURNAL

- Abdullah, D. "Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 2 (2023).

- Al Arif, M. Yasin. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2 (2015), hlm. 238–254.
- Ansor, M. "Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS di Sidang Tahunan MPR 1999-2002." *Ulumuna*, Vol. 9, No. 16 (2005), hlm. 332-350.
- Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (2011), hlm. 1–30.
- Dairani dan A. Fadlail. "Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Hadji, K. dkk. "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 182–188.
- Hanafi, Ridho Imawan. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1 (2015), hlm. 1–16.
- Hendra. "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 9-21.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Perubahan Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama Tahun 1999 Sampai Perubahan Ke-empat Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 37, No. 2 (2017), hlm. 1–20.
- Komara, E. "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 117–124.
- Latief, M. S. "Demokrasi dan Transparansi dalam Pemilu 2004." *Populasi*, Vol. 24, No. 1 (2016), hlm. 12–25.
- Malian, Sobat. "Menakar Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Pada Pemilu 2004." *Unisia*, No. 51 (2016), hlm. 79–85.

- Maulana, M. N. "Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (Studi Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)." *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 3 (2023), hlm. 67-75.
- Pigome, M. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2011), hlm. 335-348.
- Prayudi. "MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politikanya." *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 1 (2012), hlm. 1-20.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Pemilu dan Demokrasi: Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 25 (2004), hlm. 135-148.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi: Beberapa Catatan atas Pemilihan Umum pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Orde Baru." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 26 (2004), hlm. 1-20.
- Reiza, D., A. Yuniadi, dan D. Agusta. "Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal." *Sosiohumaniora*, Vol. 3, No. 3 (2001), hlm. 177-190.
- Silalahi, W. "Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 71.
- Simanjuntak, D. D. "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 45-58.
- Triwahyuningsih, T. "Kajian Yuridis Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden Langsung dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Wisanggeni, Kukuh Bergas. "Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Proses Impeachment Presiden

Abdurrahman Wahid." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4 (2019), hlm. 940–960.

Yafi, R. A. "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 1-15.

Yanuarti, S. dan M. Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2 (2013), hlm. 55-69.

